

Penulis

Fathan Mubina Dewadi | Riduwansah | Berty Sadipun
Ahmad Asroni | Zaifullah | Junaidi | Ramlah Dahlan
Gusnarib Wahab | Elizamiharti | Jihan Abdullah

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Editor: Andi Asari, M.A

Penulis

Fathan Mubina Dewadi | Riduwansah | Berty Sadipun
Ahmad Asroni | Zaifullah | Junaidi | Ramlah Dahlan
Gusnarib Wahab | Elizamiharti | Jihan Abdullah

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Editor: Andi Asari, M.A

Penerbit
litrus.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Ditulis oleh:

Fathan Mubina Dewadi

Riduwansah

Berty Sadipun

Ahmad Asroni

Zaifullah

Junaidi

Ramlah Dahlan

Gusnarib Wahab

Elizamiharti

Jihan Abdullah

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Mei 2023

Editor: Andi Asari, M.A

Perancang sampul: An Nuha Zarkasyi

Penata letak: An Nuha Zarkasyi

ISBN : 978-623-8301-33-1

vi + 126 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Mei 2023



Kata Pengantar

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang latar belakang pendidikan pancasila, landasan hukum Pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dinamika Pancasila pada era pra kemerdekaan, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai system filsafat, identitas nasional, wawasan nusantara.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Tim Penulis, 11 Mei 2023



Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

BAB 1

Latar Belakang Pendidikan Pancasila

Oleh : Fathan Mubina Dewadi 1

BAB 2

LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA

Oleh : RIDUWANSAH, SH. MH 9

BAB 3

Kerangka Konseptual Pendidikan Pancasila

Oleh : Ahmad Asroni 19

BAB 4

PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA

Oleh : Berty Sadipun 31

BAB 5

Dinamika Pancasila pada era Pra Kemerdekaan

Oleh : Zaifullah 43

BAB 6

KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Oleh : Junaidi 53

BAB 7

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Oleh : Ramlah Dahlan 65

BAB 8

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Oleh : Gusnarib Wahab 77

BAB 9

IDENTITAS NASIONAL

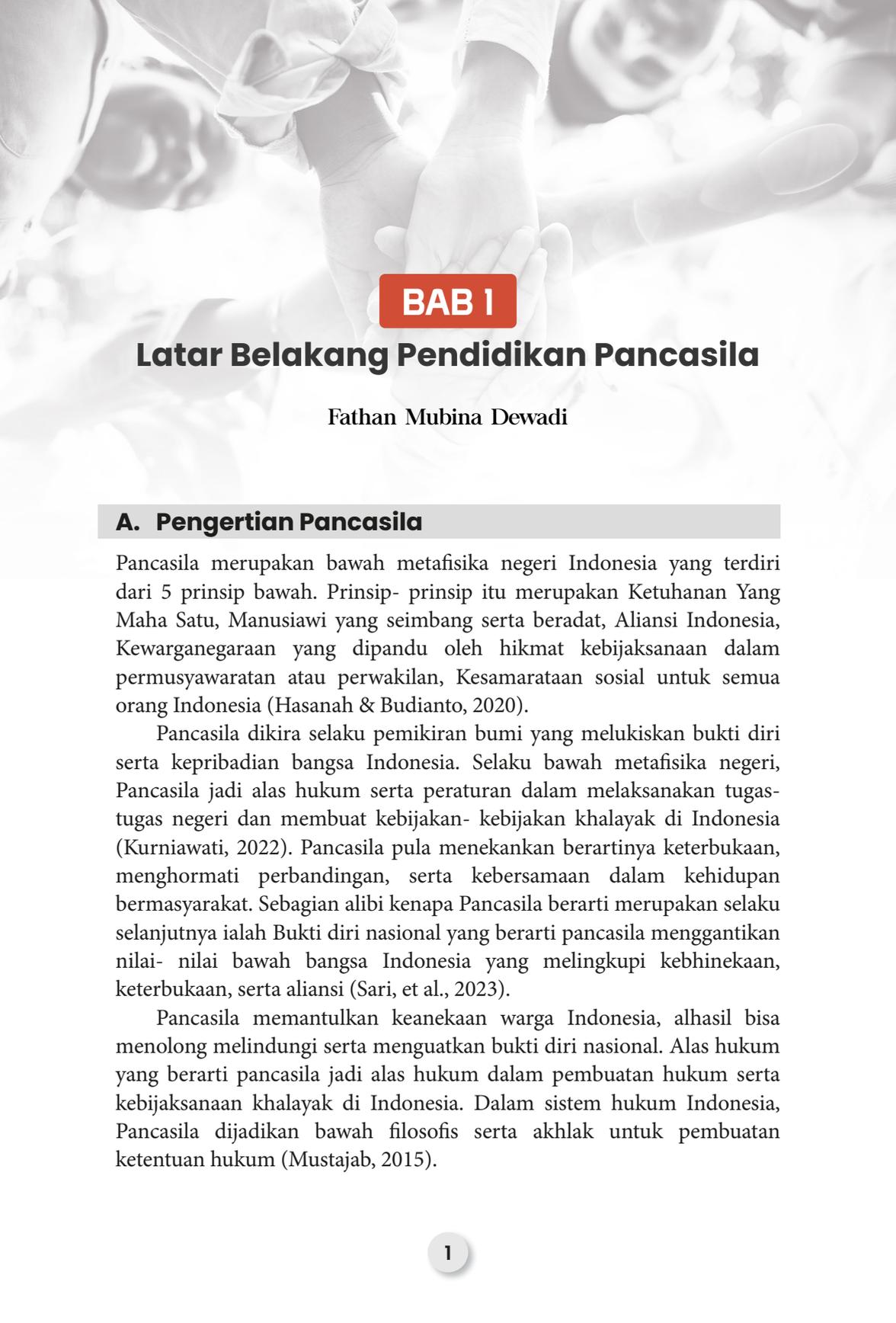
Oleh : Elizamiharti 93

BAB 10

WAWASAN NUSANTARA

Oleh : Jihan Abdullah 107

BIODATA PENULIS 123



BAB 1

Latar Belakang Pendidikan Pancasila

Fathan Mubina Dewadi

A. Pengertian Pancasila

Pancasila merupakan bawah metafisika negeri Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip bawah. Prinsip- prinsip itu merupakan Ketuhanan Yang Maha Satu, Manusiawi yang seimbang serta beradat, Aliansi Indonesia, Kewarganegaraan yang dipandu oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, Kesamarataan sosial untuk semua orang Indonesia (Hasanah & Budianto, 2020).

Pancasila dikira selaku pemikiran bumi yang melukiskan bukti diri serta kepribadian bangsa Indonesia. Selaku bawah metafisika negeri, Pancasila jadi alas hukum serta peraturan dalam melaksanakan tugas-tugas negeri dan membuat kebijakan- kebijakan khalayak di Indonesia (Kurniawati, 2022). Pancasila pula menekankan berartinya keterbukaan, menghormati perbandingan, serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian alibi kenapa Pancasila berarti merupakan selaku selanjutnya ialah Bukti diri nasional yang berarti pancasila menggantikan nilai- nilai bawah bangsa Indonesia yang melingkupi kebhinekaan, keterbukaan, serta aliansi (Sari, et al., 2023).

Pancasila memantulkan keanekaan warga Indonesia, alhasil bisa menolong melindungi serta menguatkan bukti diri nasional. Alas hukum yang berarti pancasila jadi alas hukum dalam pembuatan hukum serta kebijaksanaan khalayak di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila dijadikan bawah filosofis serta akhlak untuk pembuatan ketentuan hukum (Mustajab, 2015).

Kesamarataan sosial yang berarti Pancasila menekankan berartinya kesamarataan sosial untuk semua orang Indonesia. Perihal ini jadi berarti dalam menciptakan kelimpahan serta keselamatan bersama untuk semua susunan warga (Yunani, 2022). Menjauhi ekstremisme yang berarti Pancasila mengarahkan berartinya keterbukaan, meluhurkan perbandingan, serta menjauhi ekstremisme ataupun aksi kekerasan dalam mengupayakan kebutuhan warga (Noor, 2023). Keserasian dengan adat lokal yaitu pancasila selaras dengan adat lokal serta kebajikan lokal warga Indonesia, alhasil bisa menolong meningkatkan kebajikan lokal serta tingkatkan kebesarhatian hendak adat Indonesia (Muslimah, 2023). Dengan begitu, pancasila jadi berarti selaku bawah metafisika negeri Indonesia serta jadi bimbingan dalam melaksanakan tugas- tugas negeri dan membuat kebijakan- kebijakan khalayak di Indonesia (Suwindia & Kurnia Wati, 2022). Berikut akan dijelaskan mengenai lambang pancasila pada gambar 1.



Gambar 1. Lambang Negara RI (Widayanti, 2022)

B. Pentingnya Pendidikan

Pembelajaran amat berarti sebab mempunyai akibat yang amat besar pada kemajuan orang serta warga dengan cara totalitas. Selanjutnya merupakan sebagian alibi kenapa pembelajaran amat berarti ialah tingkatkan keahlian. Pembelajaran membagikan keahlian serta wawasan yang dibutuhkan buat menggapai tujuan serta menanggulangi tantangan dalam kehidupan (Afidah, et al., 2022).

Tingkatkan Kesempatan untuk pembelajaran membagikan kesempatan yang lebih besar dalam mencari profesi yang lebih bagus, menciptakan pemasukan yang lebih besar, serta membenarkan mutu hidup dengan cara totalitas. Kurangi Kekurangan dengan pembelajaran merupakan kunci buat kurangi kekurangan serta kesenjangan sosial

sebab membolehkan orang buat mengakses profesi yang lebih bagus serta tingkatan keahlian mereka (Pratama, 2023).

Meningkatkan Daya cipta dengan pembelajaran membagikan area yang membolehkan orang buat meningkatkan daya cipta serta kemampuan mereka dalam bermacam aspek. Tingkatkan Pemahaman dengan pembelajaran membolehkan orang buat mendapatkan wawasan serta uraian mengenai permasalahan sosial serta area yang lebih besar (Watini, et al., 2023). Tingkatkan Kesehatan ialah pembelajaran bisa menolong orang menguasai berartinya kesehatan serta *style* hidup yang segar, dan mengiklankan sikap yang lebih segar. Dengan begitu, pembelajaran mempunyai akibat positif yang amat besar untuk kemajuan orang serta warga, serta amat berarti buat diserahkan peluang yang serupa untuk seluruh orang buat mendapatkan pembelajaran yang bermutu (Syahramanda, et al., 2023).

C. Keimanan sebagai Negarawan

Berlaku seperti seorang negarawan, memiliki keimanan yang kuat dapat membantu seseorang dalam mengetuai dan mengambil ketetapan yang baik untuk keinginan rakyatnya. Keimanan yang kuat dapat memberikan dasar adab yang kokoh buat seorang negarawan untuk mempertimbangkan ketergantungan durasi jauh dari kebijaksanaan dan kelakuan yang diambilnya (Abdurrahman, 2023).

Dalam banyak kasus, angka agama pula dapat berfungsi berlaku seperti dasar buat hukum dan ketentuan mengurus negara. Berlaku seperti coretan, banyak negara di alam yang melandaskan sistem hukum mereka pada prinsip agama spesial (Cahyo, 2022).

Namun, seorang negarawan pula harus memahami jika keimanan pribadinya tidak dapat dipaksakan pada rakyatnya, sangat penting dalam negara yang menganut prinsip bebas dalam beriktikad. Oleh karena itu, seorang negarawan yang baik harus dapat melainkan antara keimanan pribadinya dan kebijaksanaan yang dia ambil untuk mengetuai negaranya (Rahman & Wahyuningtyas, 2023).

Dengan metode keseluruhan, keimanan selaku aset yang berarti buat seorang negarawan, tetapi harus diajari dengan penjelasan yang baik hal peran dan tanggung jawabnya berlaku seperti pimpinan dan deputi orang. Jadi masyarakat negeri yang beragama berarti mempunyai agama yang kokoh kepada agama yang dianut serta mempraktikkan nilai- nilai

agama dalam kehidupan tiap hari. Perihal ini bisa pengaruhi sikap serta aksi seorang, tercantum dalam kaitannya dengan tanggung jawab selaku masyarakat negeri (Maulana, et al., 2023).

Selaku masyarakat negeri yang beragama, seorang diharapkan bisa menghormati perbandingan serta berperan cocok dengan prinsip- prinsip kesamarataan, kesetaraan, serta keterbukaan. Masyarakat negeri yang beragama pula bisa mengupayakan hak- hak serta keselamatan warga dengan cara seimbang serta bersumber pada nilai- nilai agama yang diyakininya (Mustafa, 2023).

Tidak hanya itu, jadi masyarakat negeri yang beragama pula berarti meluhurkan hukum serta peraturan yang legal di negeri itu, dan menjunjung besar nilai- nilai sosial yang terdapat. Dalam kondisi ini, seorang yang beragama bisa berkontribusi dalam membuat warga yang lebih bagus lewat aksi serta sikap yang memantulkan nilai- nilai agama yang dianutnya (Bagea, 2023).

Tetapi, selaku masyarakat negeri yang beragama, seorang pula wajib senantiasa menghormati independensi berkeyakinan serta keyakinan yang berlainan dengan keyakinannya sendiri, dan tidak mendesak pemikiran ataupun agama pribadinya pada orang lain. Dengan cara totalitas, jadi masyarakat negeri yang beragama bisa membagikan akibat positif untuk diri sendiri, warga, serta negeri dengan cara totalitas, paling utama bila diaplikasikan dengan bijaksana serta *balance* (Rahman & Rahman, 2023).

D. Menjadi Negarawan yang Baik

Jadi negarawan yang bagus menginginkan beberapa mutu serta keahlian yang diperlukan buat mengetuai dengan efisien serta bertanggung jawab atas kebutuhan warga serta negeri dengan cara totalitas. Selanjutnya ini merupakan sebagian mutu yang wajib dipunyai oleh seseorang negarawan yang bagus ialah Integritas (Karyono &, 2023).

Seseorang negarawan wajib mempunyai integritas yang besar serta lalu menembus mengaplikasikan nilai- nilai akhlak serta etika dalam aksi serta ketetapan yang diambilnya. Visi serta tujuan yang nyata contoh seseorang negarawan yang bagus wajib mempunyai visi serta tujuan yang nyata mengenai tujuan yang mau digapai serta metode buat mencapainya (Wibowo & Wibowo, 2023).

Kepemimpinan yang kokoh misalnya seseorang negarawan yang bagus wajib sanggup mengetuai dengan bijak serta membuat ikatan yang

bagus dengan warga dan administratur penguasa yang lain. Keahlian berbicara ialah seseorang negarawan yang bagus wajib mempunyai keahlian buat berbicara dengan bagus serta efisien buat pengaruhi warga serta menjalankan kegiatan serupa dengan administratur penguasa serta atasan yang lain (Masuroh, 2023).

Keahlian membongkar permasalahan contoh seseorang negarawan yang bagus wajib sanggup mengenali permasalahan serta menciptakan pemecahan yang inovatif serta efisien. Intelek penuh emosi contoh seseorang negarawan yang bagus wajib mempunyai keahlian buat menguasai serta mengatur marah sendiri serta orang lain dengan bijak serta penuh ketabahan (binti Aliyashak, et al., 2022).

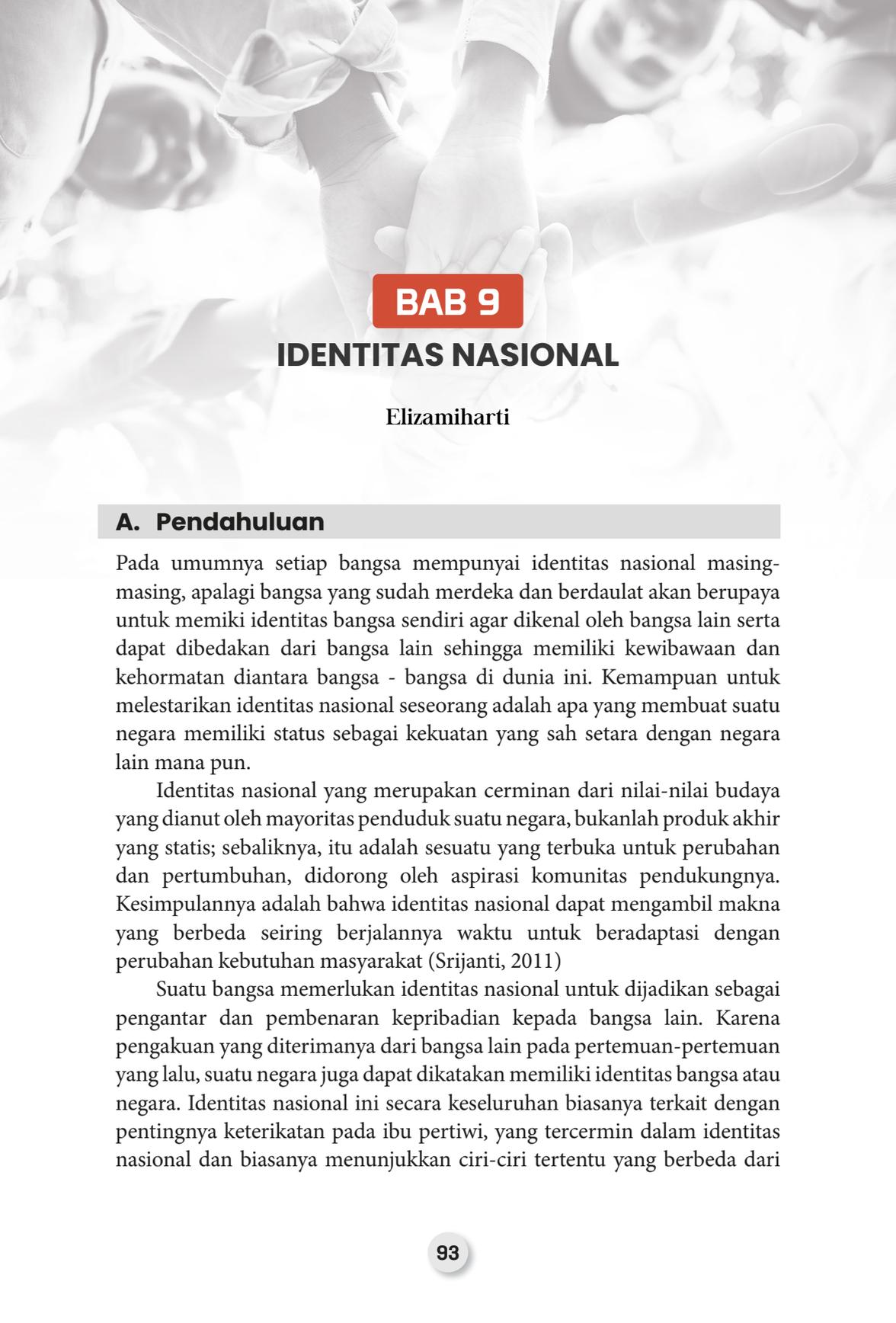
Keahlian buat menyesuaikan diri contoh seseorang negarawan yang bagus wajib sanggup menyesuaikan diri dengan pergantian serta tantangan yang terjalin di area sekelilingnya serta menciptakan pemecahan yang pas. Dalam melaksanakan tugasnya, seseorang negarawan yang bagus wajib mengutamakan kebutuhan warga serta negeri, bukan kebutuhan pribadinya ataupun kelompoknya (Yahya, 2022).

Daftar Pustaka

- A., 2023. Penanaman Fondasi Budaya Islam sebagai Akar Moderasi Beragama pada Masa Nabi Muhammad SAW. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, (1), pp. 1-15.
- Afidah, S. N., Fakhriyah, F. & Oktavianti, I., 2022. Dampak Penggunaan Gadget pada Perkembangan Emosional dan Kognitif Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Handayana*, X (2), pp. 104-114.
- Bagea, I., 2023. Mengenal Budaya Buton. *Aksara Kawanua: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), pp. 60-64.
- binti Aliyashak, N. Y., Muthalib, S. A. & Fadhli, M., 2022. *Resistensi Mahasiswa PAI terhadap Chip Domino*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Cahyo, T. A., 2022. *Pola Mediasi Penanganan Kasus Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada Masa Pandemi Covid 19*, Semarang: UIN Walisongo.
- Hasanah, U. & Budianto, A., 2020. Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Candi*, XX(2), pp. 31-54.

- Karyono, H. & K., 2023. Mencari Pemimpin Negerawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas. *Kertha Wicaksana*, 17(1), pp. 42-49.
- Kurniawati, R., 2022. *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Wisatawan Indonesia Berkunjung ke Wisata Halal Luar Negeri*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- M., 2023. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Pohuwato. *Journal on Educatio*, V(2), pp. 4987-4999.
- Masuroh, I. S., 2023. Pendidikan Ahlak yang Terkandung dalam “Biografi Umar Bin Khattab” Karya Ali Muhammad Ash-Shallabi (kajian pendidikan Islam). *INTEGRATIFJURNAL MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 2(1), pp. 56-66.
- Maulana, A., R., Mukarromah, V. & Nafisa, Y., 2023. Pembangunan Ekonomi Islam. *LAN TABUR: JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 4(2), pp. 332-340.
- Mustafa, M., 2023. Sosialisasi Pentingnya Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama melalui Semua Mata Pelajaran dalam Upaya Membangun Karakter Sosial SiswaSMP Negeri1 Talun. *E-DIMAS:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 14(1), pp. 128-135.
- Mustajab, A., 2015. Kebijakan Politik Gus Dur terhadap China Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, V(1), pp. 153-192.
- M. & Wibowo, A., 2023. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), pp. 108-112.
- Noor, H., 2023. Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum di Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, XVII(1), pp. 375-386.
- Pratama, R. L. N., 2023. *Pemberfayaan Kube Siger Bori di Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kualitas Produk dan Kesejahteraan Anggota*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Rahman, F. & Wahyuningtyas, A., 2023. *Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Ibnu Sina dalam Membangun Karakter Siswa di Era Digitalisasi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sari, D. I. et al., 2023. Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *Journal on Education*, V(2), pp. 2202-2221.
- Suwindia, I. G. & Kurnia Wati, N. N., 2022. *Nilai - Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Agama Hindu*. 1st ed. Denpasar: Jayapangus Press.
- Syahrmanda, D. D. et al., 2023. Upaya Pengembangan Profesi Guru Anak Usia Dini. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), pp. 154-165.
- Watini, S. et al., 2023. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaboratif, Holistik, Integratif, Kreatif & Inovatif di Kecamatan Sukaresmi. *Adimas: Adi Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), pp. 121-133.
- Widayanti, O. W., 2022. *tribunnews*. [Online]
Available at: <https://m.tribunnews.com/pendidikan/2022/08/10/makna-burung-garuda-pancasila-sebagai-lambang-dari-negara-indonesia>
[Accessed 13 April 2023].
- Yahya, M. A., 2022. *Pengaruh Efikasi Diri dan Motivasi Kerja terhadap Stres Kerja Perawat Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo*, Semarang: UIN Walisongo.
- Yunani, A., 2022. *Isu-Isu Perencanaan Pembangunan (Teori dan Praktek)*, Purwokerto: CV. IRDH.
- Z. & Rahman, J., 2023. Implementasi Pendidikan Agama Islam sebagai Upaya Pembentukan Karakter Islami Siswa di SMP Negeri 1 Praya. *Mahasantri*, 3(2), pp. 686-703.



BAB 9

IDENTITAS NASIONAL

Elizamiharti

A. Pendahuluan

Pada umumnya setiap bangsa mempunyai identitas nasional masing-masing, apalagi bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat akan berupaya untuk memiliki identitas bangsa sendiri agar dikenal oleh bangsa lain serta dapat dibedakan dari bangsa lain sehingga memiliki kewibawaan dan kehormatan diantara bangsa - bangsa di dunia ini. Kemampuan untuk melestarikan identitas nasional seseorang adalah apa yang membuat suatu negara memiliki status sebagai kekuatan yang sah setara dengan negara lain mana pun.

Identitas nasional yang merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh mayoritas penduduk suatu negara, bukanlah produk akhir yang statis; sebaliknya, itu adalah sesuatu yang terbuka untuk perubahan dan pertumbuhan, didorong oleh aspirasi komunitas pendukungnya. Kesimpulannya adalah bahwa identitas nasional dapat mengambil makna yang berbeda seiring berjalannya waktu untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat (Srijanti, 2011)

Suatu bangsa memerlukan identitas nasional untuk dijadikan sebagai pengantar dan pembenaran kepribadian kepada bangsa lain. Karena pengakuan yang diterimanya dari bangsa lain pada pertemuan-pertemuan yang lalu, suatu negara juga dapat dikatakan memiliki identitas bangsa atau negara. Identitas nasional ini secara keseluruhan biasanya terkait dengan pentingnya keterikatan pada ibu pertiwi, yang tercermin dalam identitas nasional dan biasanya menunjukkan ciri-ciri tertentu yang berbeda dari

negara lain, yang umumnya dikenal sebagai kebangsaan atau nasionalisme. Gagasan bahwa orang Indonesia berbagi pengalaman yang sama, masa lalu yang sama, dan rasa sakit yang sama membantu membentuk identitas nasional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai komponen suku, ras, etnik, budaya, dan agama yang berbeda sejak awal.

B. Pengertian Identitas Nasional

Asal usul istilah *identity* dapat ditelusuri kembali ke dalam bahasa Inggris, khususnya pada identitas yang memiliki arti harfiah dari tanda, sifat, atau identitas yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Menurut antropolog, identitas seseorang adalah seperangkat sifat yang menggambarkan dan sesuai dengan perasaan diri, status sosial, keanggotaan kelompok, komunitas lokal, dan asal negara. Menurut teori ini, identitas kelompok sama pentingnya dengan identitas individu. Istilah “nasional” mengacu pada rasa memiliki yang dirasakan oleh anggota kelompok besar yang memiliki kesamaan dalam bidang baik yang berwujud (*such as language and culture*) maupun yang tidak berwujud (seperti cita-cita dan ambisi) untuk membentuk rasa identitas bersama. Aksi kolektif, seringkali dalam bentuk organisasi atau kampanye berciri nasional, lahir dari jaringan kelompok-kelompok tersebut, yang kemudian disebut sebagai identitas bangsa. Asal usul istilah “nasional” terkait erat dengan perkembangan “nasionalisme” (Sunarso, 2006)

Identitas nasional pada dasarnya merupakan ekspresi cita-cita budaya yang menampakkan diri dalam berbagai segi keberadaan suatu bangsa dan mengambil ciri khas yang membedakannya dari bangsa lain. Dimungkinkan untuk mendefinisikan identitas nasional sebagai “jati diri nasional” atau “kepribadian nasional”. Sedangkan menurut Hilmi (2015) Identitas mengacu pada simbol-simbol atau tanda-tanda yang membedakan satu individu, kelompok, lembaga atau bangsa dari orang lain. Baik kepribadian jasmani maupun kepribadian halus dapat eksis. Identitas dapat disampaikan secara eksplisit oleh individu atau kelompok lain dengan membicarakan diri sendiri. Artinya, identitas nasional adalah identitas yang melekat pada seseorang atau kelompok yang lebih besar dan dihubungkan oleh kesamaan non fisik seperti cita-cita, harapan dan keinginan serta oleh kesamaan fisik seperti budaya, tradisi, kepercayaan dan bahasa daerah.

Karakteristik dan pengidentifikasi yang unik dimiliki oleh setiap negara yang ada. Barat memunculkan visi tentang masyarakat yang masuk akal, canggih secara teknologi, dan teratomisasi ketika disebutkan. Mendengar istilah “Jepang” memunculkan gambaran masyarakat teknologi modern yang tetap setia pada akar timur kunonya. Sedangkan Indonesia? Para tamu dari luar negeri sering dibuat terkejut oleh kehangatan penduduk setempat dan kedalaman tradisi Indonesia yang mereka alami selama berada di sini. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia berbeda. Indonesia, negara kepulauan terpadat di dunia, adalah negara tropis dengan musim basah dan lembab saja, dan rumah bagi lebih banyak kelompok masyarakat adat, praktik budaya, dan dialek daripada negara lain mana pun di Bumi. Begitulah keadaan di Indonesia, dan itu mungkin satu hal yang membedakan negara ini. (Ahmad Jamalong dkk 2019:59)

Menurut Tilaar (2007) Identitas nasional dan pengertian bangsa adalah suatu yang saling berkaitan. Dia mengklaim bahwa karena setiap individu menerima kebenaran darinya, negara berfungsi sebagai keseluruhan alami seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Ini menyiratkan bahwa jika seorang individu terputus dari komunitasnya, mereka kehilangan semua makna. Dengan kata lain, jika ada dalam masyarakat, seseorang akan memiliki tujuan. Seseorang dapat dibedakan dalam pengaturan hubungan internasional berdasarkan kewarganegaraannya karena bangsalah yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya.

C. Karakteristik Identitas Nasional

Setiap orang dibentuk oleh budaya di mana dia tinggal, menjadi produk akulturasi dan mengambil kebiasaan dan adat istiadat masyarakat itu. Rasa diri individu dijelaskan dan mencerminkan status sosial, kelompok, dan kebangsaan mereka. Menurut antropolog, nilai, norma, dan simbol ekspresi adalah bagian dari identitas seseorang karena berfungsi sebagai koneksi sosial yang membantu individu dan kelompok yang mengatasi tantangan dan bekerja sama untuk menghadapi masa depan. Oleh karena itu, identitas suku bangsa, kepercayaan, bahasa Indonesia, budaya bangsa, wilayah nusantara, dan falsafah pancasila yang membentuk Indonesia merupakan identitas nasional Indonesia. Untuk membedakan Indonesia dari negara lain, masyarakatnya perlu memiliki rasa persatuan dalam penampilan luar dan dalam nilai dan norma yang membentuk masyarakat

mereka. Perlu ada upaya bersama untuk membentengi identitas nasional karena merupakan fondasi keutuhan hidup bangsa dan negara. (Rahaylu, 2007)

Dalam rangka mengenal identitas nasional Indonesia ada beberapa aspek identitas nasional, termasuk yang tercantum di bawah ini. (Aulia et al., 2021):

1. Pola perilaku adalah penggambaran pola perilaku yang terbentuk dalam lingkungan sehari-hari. Misalnya, salah satu identitas bangsa yang bersumber dari budaya dan tradisi adalah kebaikan, hormat kepada orang tua, dan gotong royong.
2. Simbol berfungsi untuk menyampaikan tujuan dan fungsi negara. Simbol-simbol ini, seperti bendera, lagu nasional, dan bahasa, biasanya dituliskan ke dalam undang-undang.
3. Alat pelengkap adalah sekelompok alat yang digunakan dalam industri konstruksi, peralatan, dan teknologi untuk mencapai tujuan dan keinginan. Contohnya antara lain masjid, gereja, kapal laut, pesawat terbang, traktor, dan alat pertanian dan transportasi lainnya, serta pakaian adat dan senjata rakyat.
4. Karakter yang diturunkan dari tujuan yang ingin dicapai bersifat dinamis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan penduduk dan mensejahterakan negara sebagai negara yang otonom dan berdaulat..

D. Macam-macam Identitas Nasional

Menurut Tilaar (2007) dan Winarno (2013) Identitas nasional dibedakan atas identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer atau disebut juga identitas etnik adalah identitas yang menyebabkan munculnya identitas sekunder, sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibuat atau dibangun berdasarkan hasil konsensus. Dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, lebih dari 700 kelompok etnis yang berbeda berkumpul untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budaya etnik merupakan salah satu jenis ekspresi identitas etnik, dan dapat memainkan peran penting dalam perkembangan budaya yang pada akhirnya memunculkan identitas suatu bangsa.

Menurut Robertde Ventos, dikutip Manuel Castelles dalam bukunya “*The Powerof Identity*” (Suryo, 2002), proses pembentukan karakter bangsa melalui kontak sejarah ada 4 unsur penting, yaitu:

1. Variabel fundamental seperti ras, geografi, bahasa, dan keyakinan.
2. Variabel pendorong, yaitu munculnya angkatan bersenjata kontemporer dan kemajuan lain dalam urusan negara, serta pertumbuhan komunikasi dan teknologi.
3. Variabel penarik, seperti penguatan sistem pendidikan nasional, perluasan birokrasi, dan perubahan tata bahasa formal
4. Variabel reaktif yang pada hakekatnya merupakan bagian dari proses pembentukan karakter bangsa Indonesia dan telah berkembang sejak sebelum bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan asing.

Sumber hukum resmi mencirikan empat identitas nasional pertama sebagai berikut: bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu nasional, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bendera negara Sang Merah Putih
Diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24. Bendera Merah Putih dikibarkan pada Sumpah Pemuda 1928 sebelum dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Di Indonesia, warna putih berarti keramat yang melambangkan jiwa manusia, sedangkan warna merah berarti gagah berani, yang melambangkan tubuh manusia.
2. Bahasa Negara Bahasa Indonesia
Diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai Pasal 45. Bahasa Indonesia mengacu pada negara secara keseluruhan. Kesepakatan dengan para pemimpin pendiri negara menyebabkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. Bahasa negara yang merupakan anggota rumpun bahasa Melayu dan digunakan sebagai lingua franca (bahasa sosial) yang mendorong berkembangnya rasa identitas nasional dan solidaritas di antara masyarakat Indonesia. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Kongres Pemuda dipilih dan diikrarkan menjadi bahasa pemersatu.
3. Lambang Negara Garuda Pancasila
Diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai Pasal 57. Garuda adalah burung yang ada di mana-mana yang berfungsi sebagai simbol nasional Indonesia. Garuda, juga dikenal sebagai “*The King of Guardians*,” adalah burung resmi nasional Indonesia. Ketekunan

dan keberanian diwakili oleh burung. Setiap sayap memiliki 17 helai, mewakili ketujuh belas. Agustus adalah bulan kedelapan, jadi sayap burung memiliki delapan bulu untuk menandakan ini. Bulu-bulu kecil di bawah jambul bernomor 19, dan bulu-bulu kecil di bawah kerah bernomor 45, untuk menunjukkan tahun 1945 (Lubis, 2018).

Khatulistiwa diwakili oleh garis gelap lebar yang membentang di tengah perisai elang. Lambang Garuda Pancasila melambangkan perlindungan Indonesia. Pancasila terdiri dari lima ruang pada lambang, yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya dibagian tengah perisai berbentuk bintang yang tersudut lima lima;
 - b. Sebuah rantai dengan mata bulat dan persegi di kiri bawah perisai melambangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - c. Pohon beringin di kiri atas perisai melambangkan persatuan Indonesia;
 - d. Sebuah kepala banteng di kanan atas perisai melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
 - e. Kapas dan padi di kanan bawah perisai melambangkan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..
4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Indonesia Raya sebagai lagu Patriotisme oleh Wage Rudolf Supratman. Pertama kali dibawakan pada 28 Oktober 1928, Indonesia Raya dijadikan sebagai lagu nasional Indonesia. (Winarno, 2013). Penjajah melarang rakyat menyanyikan lagu ini pada masa penjajahan, tetapi rakyat mengabaikannya dan tetap menyanyikannya, memperkuat persatuan mereka melawan kolonialisme dan memupuk rasa kebanggaan nasional yang lebih kuat, nasib bersama, dan keinginan untuk berperang.

E. Identitas Nasional sebagai karakter Bangsa

Tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah memperkuat dan mengembangkan karakter bangsa sehingga dapat menjadi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI) dari berbagai ancaman yang bersumber baik dari dalam maupun dari luar. Jika warga suatu negara kuat, ulet, cerdas, dan berkepribadian kuat berdasarkan bagaimana mereka

memandang kehidupan negaranya, maka negara itu akan berdiri tegak. Kata “karakter” berasal dari kata Latin “*kharakter*,” juga dikenal sebagai “*kharassein*” atau “*kharax*.” Hal ini juga dikenal sebagai “*caractere*” dalam bahasa Prancis dan “*character*” dalam bahasa Inggris. Karakter secara umum dipahami sebagai ciri kejiwaan, akhlak, budi pekerti, budi pekerti, budi pekerti, yang membedakan seseorang dengan yang lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, karakter bangsa dapat diartikan sebagai watak atau ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Setiap bangsa memiliki identitas yang menjadi landasan untuk memahami jati diri bangsanya dan dapat mengharumkan nama bangsanya. Menurut Weber, cara terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami karakter (perilaku) anggotanya. Secara sosiologis, salah satu karakter dibentuk oleh identitas bangsa. Akibatnya, identitas nasional akan membentuk karakter bangsa.

Identitas Nasional adalah karakter bangsa yang mewujudkan nilai-nilai kejujuran, toleransi, pengendalian diri, disiplin, kreativitas, kemandirian, demokrasi, patriotisme, cinta tanah air, menghargai kesuksesan, kegemaran sastra, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab hanyalah beberapa contoh nilai. Bahasa, masyarakat, dan kesehatan fisik adalah variabel tambahan yang menurut tatanan ciri sosial turut membentuk identitas bangsa.

Menurut Arwiyah dan Runik Marcbroh, dari perspektif karakter bangsa Indonesia, ciri-ciri berikut menentukan identitas nasional Indonesia (Arwiyah & Machbroh, 2014):

1. Manusia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan YME.
2. Mencintai sesama manusia, keluarga, masyarakat, bangsa dan tanah airnya.
3. Menghormati sesama warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial budaya.
4. Dapat hidup bersama dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari perbedaan budaya, etnik dan agama (Modul pembelajaran Pendidikan

Menurut Ubaedillah et al., (2003) Secara umum, beberapa hal yang membentuk karakter bangsa, antara lain:

1. Pola Perilaku, adalah gambaran sikap yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, salah satu aspek identitas bangsa yang bersumber dari tradisi dan budaya adalah keramahan, penghormatan kepada orang tua, dan kerja sama timbal balik.

2. Simbol-simbol, berfungsi untuk menyampaikan tujuan dan tugas negara. Simbol ini biasanya disebutkan dalam undang-undang, seperti lagu kebangsaan, bendera, dan bahasa.
3. Yang dimaksud dengan “peralatan” adalah berbagai alat atau barang yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi, seperti candi, masjid, gereja, pakaian adat, alat pertanian, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain.
4. Tujuan yang ingin dicapai yang berasal dari tujuan yang dinamis dan berubah-ubah, seperti budaya yang lebih baik atau pencapaian di bidang tertentu. Pembukaan UUD 1945 menggariskan tujuan bersama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermukim dalam suatu bangsa, yaitu akal sehat dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

F. Pancasila sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional

Filosofi dan norma fundamental yang menjadi pedoman perilaku akan berdampak signifikan pada bagaimana masyarakat Indonesia mendefinisikan identitas nasionalnya. Masing-masing perbedaan ini pada akhirnya akan mendefinisikan Indonesia sebagai sebuah negara. Pancasila, ajaran resmi negara Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan identitas bangsa Indonesia tersebut.

Pencapaian demokrasi yang paling signifikan dari para pemimpin pendiri Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan sebuah konsensus nasional bangsa Indonesia yang majemuk. Kebhinekaan Indonesia dibingkai oleh Pancasila. Pancasila adalah representasi dari kemurnian dan kebersamaan Indonesia, tempat di mana ideologi dan nilai yang sama bergabung bersama untuk menciptakan landasan bersama bagi wacana nasional.

Identitas suatu bangsa dapat dianggap sebagai jumlah total dari karakteristik yang membuat warga negaranya unik. Dengan demikian, konsep karakter bangsa tidak dapat dipisahkan dg pengertian “*peoples character*”, “*national character*” atau “*national identity*”. Dalam membahas jati diri bangsa Indonesia, gambaran yang hanya didasarkan pada ciri-ciri tubuh saja tidak cukup untuk memahami keunikan karakter bangsa. Masyarakat Indonesia beragam dalam hal kebangsaan, ras, budaya, dan kepercayaan, dan perbedaan tersebut telah ada sejak awal negara ini.

Setelah deklarasi 17 Agustus 1945, kepribadian sejarah bangsa Indonesia berkembang dan menemukan jati dirinya.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Pancasila disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*), ideologi bangsa dan lain-lain. Pancasila tidak ditegakkan oleh kekuatan tertentu melainkan dikembangkan melalui diskusi dengan anggota BPUPKI yang mewakili berbagai daerah dan kelompok agama. Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia yang sudah diparaktekkan oleh nenek moyang kita secara turun temurun. Pancasila sangat penting keberadaannya untuk mempersatukan bangsa dan menjadi identitas nasional Indonesia.

Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang unik karena hanya ada di Indonesia. Pancasila memberikan ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia, artinya Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia sudah selayaknya dijadikan landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari guna membedakan diri dengan bangsa lain.

Menghidupkan kembali Pancasila adalah langkah penting untuk memperkuat persatuan nasional. Pancasila perlu dipelajari secara utuh, termasuk kata pengantarnya, dan dieksplorasi dalam dimensi berikut:

1. Realitas: keadaan eksternal pertumbuhan dan perkembangan sosial, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkonsentrasi di dalamnya.
2. Idealis: dalam arti ideologi yang dikandungnya bukanlah surga melainkan “kata kerja” untuk meningkatkan kepercayaan diri di masa depan yang lebih cerah.
3. Fleksibilitas: Pancasila dapat ditempa dalam arti bahwa ia dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan zaman yang berbeda. Dalam perannya sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tetap aktual, relevan, dan efektif.

G. Unsur-Unsur Identitas Nasional

Identitas Nasional Indonesia menggambarkan negara yang majemuk. Perpaduan faktor-faktor pembentuk identitas seperti suku bangsa,

kepercayaan, masyarakat, dan bahasa dikenal dengan istilah identitas nasional.

1. Suku; adalah tipe unik dari organisasi sosial askriptif (sudah ada sejak lahir) yang memiliki gaya yang sama dengan usia dan jenis kelaminnya. Ada banyak suku atau kelompok etnis di Indonesia, dan setidaknya ada 300 ragam bahasa yang berbeda.
2. Agama; Masyarakat Indonesia terkenal dengan religiusitasnya. Di Nusantara agama yang besar yang tumbuh dan berkembang antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Frasa “agama resmi negara” telah dihapuskan sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, namun Khonghucu tidak diakui sebagai agama resmi negara pada masa Orde Baru. Indonesia adalah negara dengan banyak agama yang berbeda, dan akibatnya dianggap rentan terhadap perpecahan bangsa. Oleh karena itu, mengembangkan budaya saling menghormati di antara kelompok agama yang mapan merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan antar umat beragama.
3. Budaya; pengertian manusia sebagai makhluk sosial yang isinya merupakan alat atau model pengetahuan yang digunakan pendukungnya secara kolektif untuk menafsirkan dan memahami lingkungan tempat tinggalnya, dan yang dijadikan acuan atau pedoman untuk bertindak (berupa perilaku dan benda budaya) dalam sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya dihadapinya.
4. Bahasa dan faktor lain yang berkontribusi terhadap identitas nasional. Ketika berbicara tentang kontak manusia, bahasa dipandang sebagai sistem simbolik yang dibuat secara acak dari komponen bahasa manusia.

Menurut Sunarso (2006) dengan mempertimbangkan karakteristik suatu negara yang disebutkan di atas, kita dapat membaginya menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Pancasila sebagai teori penuntun bangsa dan landasan negara, serta doktrin resmi negara, adalah pilar pertama dari identitas fundamental Indonesia.
2. Bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, bendera negara Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia “Indonesia Raya” membentuk “Instrumental Identity” Indonesia, yang juga mencakup

Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangnya dari tahun 1945.

3. Keanekaragaman nusantara, budaya, bahasa, agama, dan ideologi merupakan bagian dari “identitas alamiah” suatu bangsa.

H. Keterkaitan Globalisasi Dengan Identitas Nasional

Era globalisasi ditandai dengan kemajuan jaringan, transportasi, dan teknologi sejak awal abad ke-20. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk internasionalisasi. Hal ini menyebar dengan cepat dan luas, tidak hanya melintasi perbatasan negara dengan perkembangan ekonomi rendah yang masih berkembang atau miskin, tetapi juga di negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi (Sebayang, 2019). Globalisasi memfasilitasi interaksi global dan secara bertahap menghilangkan hambatan yang mencegahnya. Globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap identitas bangsa karena hubungan antar bangsa semakin erat dan perbatasan antar negara tidak lagi menjadi penghalang, sehingga menimbulkan pengaruh positif dan negatif. Munculnya berbagai kejahatan transnasional seperti narkoba, pencucian uang, pemalsuan dokumen, dan terorisme. Berbagai kejahatan tersebut akan berdampak negatif terhadap nilai-nilai budaya bangsa sehingga menimbulkan kerugian yang cukup berarti bagi kepribadian bangsa, khususnya di kalangan generasi muda. Jika kejahatan ini tidak diberantas, keamanan nasional akan terganggu bangsa Indonesia dan semakin lama akan melunturkan kepribadian bangsa.

Yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana agar identitas nasional suatu bangsa tidak tercerabut dan tetap melekat dalam semangat dan tercermin dalam setiap perilaku masyarakat negara tersebut meskipun berinteraksi langsung dengan arus globalisasi saat ini. Dengan kata lain, agar globalisasi memberikan efek positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara, cita-cita lokal harus dimasukkan ke dalam proses tersebut.

Pentingnya kearifan lokal sangat berperan dalam menumbuhkan identitas bangsa dalam hubungan masyarakat internasional di Indonesia, negara dengan penduduk yang sangat beragam, sehingga dapat menjadi ciri bangsa yang dapat dikenal secara luas. Munculnya nilai-nilai kearifan lokal dapat memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk menanamkan rasa hormat terhadap negara pada setiap warganya. Implementasi

pengembangan kearifan lokal secara jelas diperlukan agar berdampak pada tercapainya tujuan, yaitu meningkatkan kepercayaan warga terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ada.

I. Kesimpulan

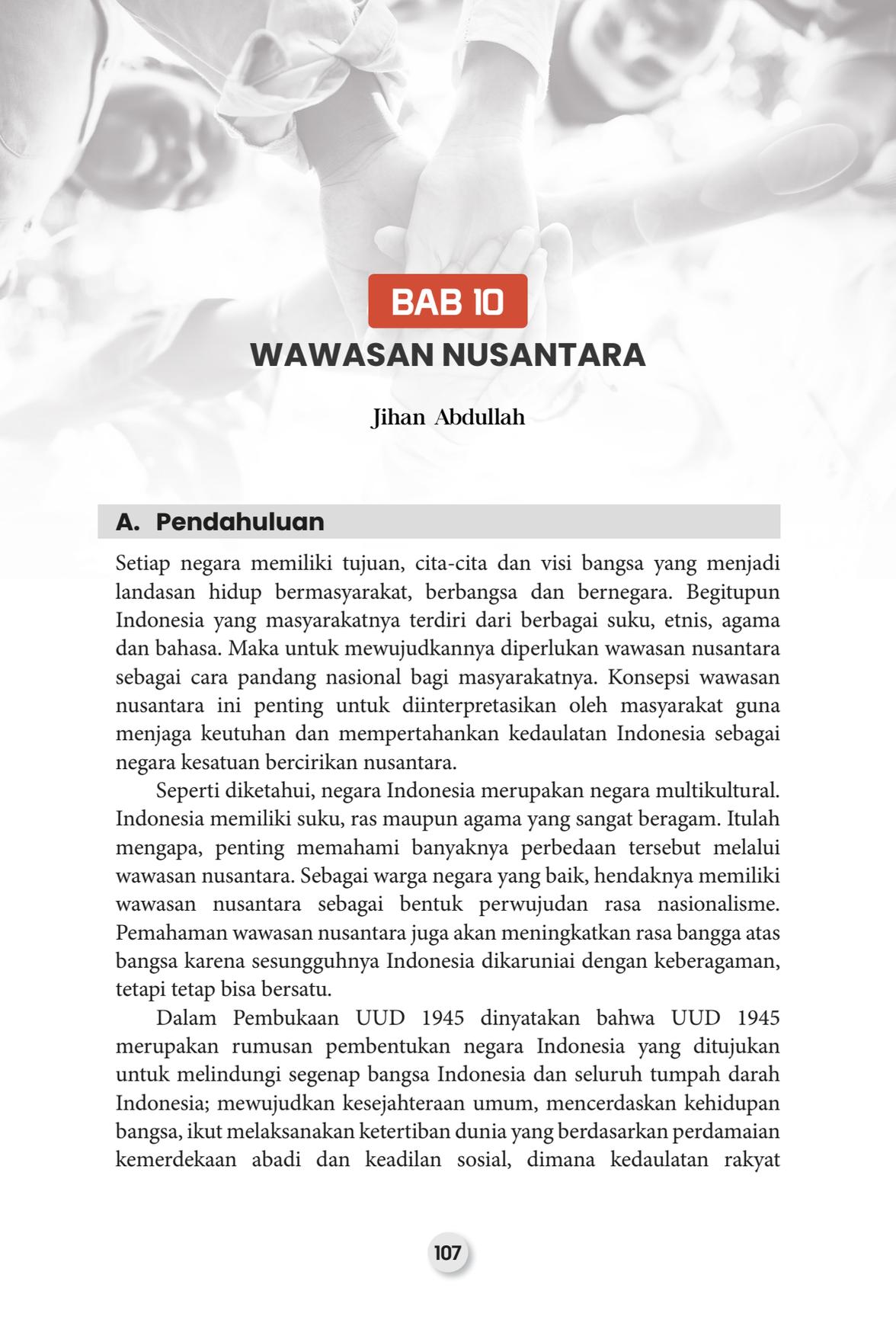
Suatu bangsa harus memiliki identitas nasional agar memiliki kepribadiannya sendiri sehingga diakui oleh bangsa lain. Negara kesatuan dengan kekuatan dan kehormatan bangsa dan negara, menjadikannya lebih dari sekedar ciri khas Indonesia di mata dunia luar. Keanekaragaman suku dan budaya, serta keberadaan lambang negara Indonesia seperti bendera merah putih, bahasa persatuan Indonesia, lambang negara Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan UUD 1945, semuanya berkontribusi terhadap kemajuan negara yang berkarakter unik. Selain itu, pentingnya gagasan bangsa Indonesia, khususnya Pancasila, memberikan kontribusi terhadap karakter bangsa Indonesia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme dan loyalitas yang kuat, maka identitas nasional harus ada karena merupakan ciri sekaligus pemersatu negara.

Sebagai hasil dari pengalaman, masa lalu, dan penderitaan mereka yang sama, masyarakat Indonesia yang beragam telah menjadi satu negara, terlepas dari asal-usul budaya dan etnis mereka yang banyak dan beragam (Bhineka Tunggal Ika). Bersatu mewujudkan keinginan bersama mencapai kemerdekaan bangsa, dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai mana tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Referensi

- Arwiyah, Y., & Machbroh, R. (2014). *Civic Education di Perguruan Tinggi Indonesia*. Alfabeta.
- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549–8557. <https://doi.org/2614-6754>
- Chamin. (2003). *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*. Ditlitbang Muhammadiyah dan LP3 UMY.
- Hilmi, R. (2015). Moral Dan Identitas Nasional Dalam Era Globalisasi. *Al-Burhan*, 7(2), 40.

- Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Erlangga.
- Lubis, M. A. (2018). *Pembelajaran PPKn (Teori Pengajaran Abad 21 di SD/MI)*. Samudra Biru.
- Rahaylu, M. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Grasindo.
- Sebayang, E. R. (2019). Mempertahankan Identitas Nasional di Era Digital. *Rangkiang: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(2), 107–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.22202/JR.2020.V1i2.3778>
- Srijanti. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan di PT: Mengembangkan Etika Berwarga Negara*. Salemba Empat.
- Sunarso. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. UNY Press.
- Suryo. (2002). Pembentukan Identitas Nasional. *Makalah Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan Tentang Civic Education LP3 UMY Yogyakarta*,.
- Tilaar. (2007). *MengIndonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Rineka Cipta.
- Ubaedillah, Ahmad, & Rozak, A. (2003). *Pendidikan Kewarga(negara)an, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Winarno. (2013). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Sinar Grafika.



BAB 10

WAWASAN NUSANTARA

Jihan Abdullah

A. Pendahuluan

Setiap negara memiliki tujuan, cita-cita dan visi bangsa yang menjadi landasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitupun Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, etnis, agama dan bahasa. Maka untuk mewujudkannya diperlukan wawasan nusantara sebagai cara pandang nasional bagi masyarakatnya. Konsepsi wawasan nusantara ini penting untuk diinterpretasikan oleh masyarakat guna menjaga keutuhan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan bercirikan nusantara.

Seperti diketahui, negara Indonesia merupakan negara multikultural. Indonesia memiliki suku, ras maupun agama yang sangat beragam. Itulah mengapa, penting memahami banyaknya perbedaan tersebut melalui wawasan nusantara. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya memiliki wawasan nusantara sebagai bentuk perwujudan rasa nasionalisme. Pemahaman wawasan nusantara juga akan meningkatkan rasa bangga atas bangsa karena sesungguhnya Indonesia dikaruniai dengan keberagaman, tetapi tetap bisa bersatu.

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa UUD 1945 merupakan rumusan pembentukan negara Indonesia yang ditujukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, dimana kedaulatan rakyat

berdasarkan kepada ke Tuhan-an yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan kata lain UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini merupakan kesepakatan bangsa Indonesia bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh sebab itu segala permasalahan golongan, kelompok dan perseorangan dikelola oleh negara, artinya kepentingan negara dalam segala aspek dan perwujudannya lebih diutamakan di atas kepentingan golongan, kelompok dan perseorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan senantiasa memperhatikan hak asasi manusia, aspirasi masyarakat, dan kepentingan daerah yang berkembang saat ini.

Wawasan nusantara sebagai konsepsi geopolitik, menekankan kesadaran warga negara akan pentingnya kesadaran bagi warga negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup (*living space*), sekaligus menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme ini mendorong masyarakat untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mendorong bangsa Indonesia untuk menunjukkan harkat dan martabatnya diantara bangsa-bangsa lain didunia. Lantas, apakah wawasan nusantara itu?

B. Pembahasan

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah Wawasan Nusantara terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Nusantara”. **Wawasan** berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti: (2) konsepsi cara pandang. **Nusantara** berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu *nusa* yang berarti “pulau” dan *antara* yang berarti “luar”. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti Indonesia.

Pada masa lalu, menurut Sita W Dewi (2013) Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa). Perkataan Nusantara kita dapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit (tahun 1258 Saka/1336 M) yang tertulis di dalam Kitab Pararaton (Raja-raja)

Justus M. Van der Kroef (1951) Istilah Nusantara dihidupkan kembali oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai alternatif kelanjutan dari Hindia Belanda yang belum terwujud. Meskipun nama Indonesia yang berarti Kepulauan Hindia (dari bahasa Yunani, Indo-Indos berarti India, nesia-nesos berarti Pulau) disetujui untuk dipakai, namun penggunaan istilah Nusantara tetap dipakai sebagai sinonim untuk Kepulauan Indonesia. Pengertian ini sampai sekarang dipakai di Indonesia. Akibat perkembangan politik selanjutnya, istilah ini kemudian dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan Geografi-Antropologi Kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya, namun tidak mencakup Filipina. Nusantara adalah sebutan untuk wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai ke Papua dimana hingga sekarang sebagian besar termasuk wilayah negara Indonesia. **Wawasan Nusantara** adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya, sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan atau lebih tepat merupakan “visi kepulauan Indonesia”. Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya, yang terletak di antar dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Hal ini terkait dengan sikap negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, maka perairan yang terdapat di antara pulau-pulau itu harus dianggap sebagai elemen penghubung, bukan sebagai faktor pemisah.

Widoyo Alfandi, *Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik*.(2002) Perjuangan para pendahulu bangsa untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai cakupan wilayah yang utuh tidak terpisahkan baru terjadi di tahun

1957, dua belas tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perdana Menteri Djuanda Kartasasmita mengumumkan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, dikenal sebagai "Deklarasi Djuanda", yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. Pengumuman pemerintah ini mempertimbangkan. (1) Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri; (2) Bagi keutuhan territorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan bulat; (3) Penentuan batas laut territorial seperti yang termaktub dalam menggantikan Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* Stbl.1939 No. 442 artikel ayat 1 yang tidak lagi sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian terpisah dengan territorial. Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah Republik Indonesia, tentang perairan negara Republik Indonesia, yang isinya:(1) Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (*low water line*), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (*straight base line*) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI. (2) Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. (3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, dimana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Djuanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

Secara terminologis, wawasan nusantara menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

Menurut Kelompok Kerja LEMHANAS (1999) Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Menurut Sumarsono (2002) wawasan nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara.

Menurut Damri dan Fauzia Eka Putra (2020) Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila UUD 1945 sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya. Dan yang menjiwai dalam tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Tujuan perjuangan nasional yang dimaksud disini adalah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 aline ke-2 dan ke-4, yaitu:

“...Mewujudkan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradap;
- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
- e. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

2. Konsep Wawasan Nusantara

Latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsepsi wawasan nusantara antara lain: aspek sejarah, aspek geografis, serta aspek geopolitis dan kepentingan sosial budaya.

a. Aspek Sejarah

Dilihat dari tinjauan historis, perkembangan bangsa Indonesia dapat dikategorikan dalam kurun waktu sebagai berikut: (1) Zaman perintis 1908, ditandai dengan munculnya pergerakan nasional Budi Utomo. (2) Zaman Penegas 1928, ditandai dengan ikrar sumpah pemuda. (3) Zaman Pendobrak, ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan NKRI 17 Agustus 1945.

b. Aspek Geografis

Kondisi geografis negara Indonesia, yaitu: (1) Indonesia merupakan negara maritim karena 2/3 wilayahnya lautan dan 1/3 adalah wilayah daratan. (2) Indonesia berbentuk negara kepulauan dapat disebut nusantara (nusa diantara air) yang berdasarkan konsep negara kepulauan (*archipelago state concept*) dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508 pulau. (3) Luas wilayah negara Indonesia 5.192 juta km² dengan perincian luas daratan 2.027 juta km² dan luas lautan 3.166 juta km². (4) jarak dari arah Utara – Selatan 1.888 km dan jarak dari arah Timur – Barat 5.110 km. (5) Negara Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudra. (6) Terletak dibawah orbit *Geostationary Satellite Orbit* (GSO).

c. Aspek Geopolitis dan Kepentingan Sosial

Geopolitik adalah istilah yang dikemukakan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik. Sebagai ilmu geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Bahwa pada umumnya politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi antara negara yang bersangkutan. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan. Prinsip – prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu. Di Negara Republik Indonesia, orang pertama yang mengaikan hal geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Ir Soekarno dalam pidatonya dihadapan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Untuk dapat mewujudkan berbagai tujuan seperti tersebut di atas maka perlu untuk mengimplementasikan konsepsi wawasan nusantara.

Teori geopolitik di Republik Indonesia adalah wawasan nusantara. Bangsa Indonesia tidak dapat menerima berbagai rumusan dari teori-teori tentang geopolitik yang dianut oleh negara-negara lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagi bangsa Indonesia geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan manfaat dan pengetahuan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

3. Tujuan dan Fungsi Wawasan Nusantara

Adanya pandangan mengenai wawasan nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Kemudian penting juga untuk mengetahui dan memahami apa saja tujuan serta fungsi wawasan nusantara bagi Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia beranggapan bahwa wawasan nusantara cukup hanya dengan mengaku sebagai warga negara Indonesia, saat ini dunia mengalami pergeseran dan perubahan pola kehidupan yang sangat fundamental wawasan nusantara bertujuan untuk tetap menyatukan rakyat dalam mencapai tujuan. Tentunya jika kita tidak memiliki wawasan nusantara maka seseorang akan berperilaku untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kelompok tertentu tanpa memikirkan dampaknya pada bangsa Indonesia sendiri.

Tujuan yang paling mendasar dari wawasan nusantara adalah bagaimana yang tercantum dalam falsafah Undang-undang dasar kita yaitu harus dapat berupaya melindungi segenap bangsa maupun tumpah darah Indonesia serta turut berkontribusi dan mensukseskan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga bangsa dianggap sebagai bangsa yang besar tertib dan damai.

Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan Nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih

mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional.

Untuk mempercepat tujuan wawasan nusantara, perlu dilakukan pemasyarakatan materi wawasan nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan cara berikut: (1) menurut sifat atau cara penyampaian: (a) Langsung, seperti ceramah, diskusi, tatap muka. (b) Tidak langsung, seperti media elektronik dan media cetak. (2) Menurut metode penyampaian: (a) Keteladanan, melalui metode penuluran keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya. (b) Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. (c) Komunikasi, tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik. (d) Integrasi, tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan/sosialisai wawasan nusantara melalui metode ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa mendatang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional.

2. Fungsi wawasan Nusantara

Mengapa wawasan nusantara itu sangat penting dalam kehidupan, hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia meyakini akan kebenaran falsafah dan ideologi untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara dapat berfungsi sebagai katalisator dalam berpikir dan berperilaku rakyat Indonesia dalam kehidupan berkebangsaan dan bernegara.

Menurut Damri dan Fauzia Eka Putra (2020) fungsi wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain: (1) Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. (2) Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, kesatuan pertahanan dan keamanan. (3) Fungsi wawasan Nusantara pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan

negara. (4) Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

Menurut C.s.t Kansil Cristine S.T. Kansil., (2005) fungsi wawasan Nusantara adalah (1) membentuk dan pembina persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia. (2). Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara Negara ditingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi utama dari wawasan nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara.

Fungsi wawasan nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu:

- a. Wawasan Pertahanan dan Keamanan nasional: Mengarah pada pandangan geopolitik Negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Wawasan Kewilayahan Indonesia: Termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain.
- c. Wawasan Pembangunan: Dengan beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi.
- d. Konsep Ketahanan Nasional: Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional.

4. ASAS WAWASAN NUSANTARA

Asas merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama.

Damri dan Fauzi Eka Putra (2020) Menjelaskan enam Asas Wawasan Nusantara:

- a. Kepentingan yang sama, ketika masih dijajah oleh pihak kolonial Belanda, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi para penjajah demi memperoleh kemerdekaan dan kebebasan. Untuk saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi penjajahan fisik, masalah yang dihadapi saat ini lebih mengarah pada adu domba untuk memecah belah bangsa.
- b. Keadilan, asas keadilan merujuk pada kesesuaian pembagian hasil (kekayaan Indonesia) dengan adil, baik itu perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
- c. Kejujuran, asas kejujuran merujuk pada keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realitas dan ketentuan yang berlaku.
- d. Solidaritas, asas solidaritas merujuk pada kegiatan berupa kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa harus meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
- e. Kerjasama, asas kerja sama berhubungan dengan adanya koordinasi dan saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik itu kelompok kecil maupun besar sehingga tercipta sinergi yang lebih baik.
- f. Kesetiaan, asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama tentang bangsa Indonesia. Kesepakatan bersama tersebut meliputi kesepakatan yang mulai dirintis dari Budi Oetomo tahun 1908, Sumpah pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

5. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diantaranya adalah:

a. **Implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi.**

Dalam bidang ekonomi implementasi wawasan nusantara akan menciptakan tatan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Prinsip-prinsip implementasi

wawasan nusantara dalam bidang ekonomi yaitu: (a) kekayaan diwilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan diseluruh wilayah Indonesia secara merata. (b) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang diseluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya. (c) Kehidupan perekonomian diseluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Contoh implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah dengan keluarnya Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan pada pemerintahan pusat.

b. Implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik

(a) Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU partai politik, UU pemilihan Umum, dan UU pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala Daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. (b) pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. (c) mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. (d) memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat

kebangsaan dan kesatuan. (e) Meningkatkan peran Indonesia dalam kanca internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

c. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya.

(a) mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan disemua daerah dan program wajib belajar dan harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. (b) pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

d. Implementasi wawasan nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi pertahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dan dapat dikatakan bahwa wawasan nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

Penerapan Wawasan Nusantara juga adalah (1) diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. (2) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup sebagian besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. (3) pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia

internasional terutama negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai. Untuk itu dibutuhkan:

- 1) Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

Setiap sila dari Pancasila menjadi dasar pengembangan dari wawasan nusantara, yaitu:

- a) Sila ke-1 (Ketuhanan yang maha Esa) menjadikan wawasan nusantara merupakan wawasan yang menghormati kebebasan beragama.
 - b) Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menjadikan wawasan nusantara merupakan wawasan yang menghormati dan menerapkan HAM (Hak Asasi Manusia).
 - c) Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) menjadikan wawasan nusantara merupakan wawasan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
 - d) Sila ke-4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) menjadikan wawasan nusantara merupakan wawasan yang dikembangkan dalam suasana musyawarah dan mufakat.
 - e) Sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menjadikan wawasan nusantara merupakan wawasan yang mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional tertuang didalam: 1)perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa

lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. (2) perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. (3) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriyah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. (4) Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia.

6. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara di Era Modern.

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu yang wajar, alamiah. Dalam dunia ini yang abadi dan kekal adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan dibentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang wawasan persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.

Warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik

untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan IPTEK, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan dan pemeliharaan persatuan.

Setiap warga negara sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara dan bangsa. Dengan konsep wawasan nusantara secara geografis, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Diantaranya yaitu:

a. Perkembangan Pesat Teknologi

Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan nusantara, mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

b. Kapitalisme

Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan *Buttom Up Planning*, sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional (pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

C. Penutup

Berdasarkan permasalahan dalam kajian ini tentang upaya peningkatan pemahaman wawasan nusantara sebagai sarana dalam meningkatkan semangat nasionalisme bagi warga negara Indonesia dapat ditarik beberapa hal yang dianggap sangat penting. Negara Indonesia merupakan

negara kepulauan, wilayah yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang lebih 17.508 pulau memerlukan pengawasan yang cukup ketat, dimana pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia.

Keberagaman dalam Indonesia akan disatukan dalam satu ideologi bangsa Bhineka tunggal ika dan persatuan dan kesatuan bangsa. Orang-orang yang berwawasan nusantara akan selalu menjaga ketertiban, keamanan dan ketenangan berupaya mematuhi tata tertib dan peraturan yang ditentukan oleh Undang-undang dan hukum yang telah diatur dalam tatanan ketatanegaraan.

Minimnya pemahaman akan wawasan nusantara akan mengakibatkan dampak yang cukup besar baik untuk diri sendiri dan orang lainnya tentunya. Salah satu perilaku yang mencerminkan tidak memiliki wawasan nusantara adalah melakukan penyelewengan, melakukan kerusakan dan keributan.

Kepustakaan

- Alfandi Widoyo, *Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University., 2002
- Cristine S.T. C.s.t Kansil *Pendidikan Kewarganegaraan* di perguruan tinggi Jakarta, pradnya paramita, 2005.
- Fauzia Eka Putra dan Damri *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta kencana 2020
- Lemhanas, *Wawasan Nusantara* ciamis; Bina Karya 1999
- M Budiarto *wawasan nusantara dalam peraturan perundang undangan* Jakarta ghalia Indonesia 1980
- Suparyanto Yudi *Landasan Dasar Wawasan Nusantara*, EDISI, Cet 1, Bandung Cempaka Putih, 2008
- Sumarsono *Sosiolinguistik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- S. Sumarsono *Cara pandang Geopolitik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

BIODATA PENULIS



Fathan Mubina Dewadi merupakan pria yang berusia 30 tahun sudah tertarik dengan bidang Pendidikan tinggi sejak tahun 2015. Sejak lulus jurusan Teknik mesin program pascasarjana Universitas Pancasila. Kini penulis sedang bekerja sebagai dosen tetap program studi Teknik mesin di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kini kesibukan penulis alah lebih menghabiskan waktu untuk mengajar dan menulis. Karya-karya yang telah dibuat dimuat di media *online*, jurnal nasional, jurnal nternasional dan jurnal nasional bereputasi. Sudah lebih dari 50 karya yang telah dibuat dan sedang proses untuk pembuatan buku dan bab buku.

RIDUWANSAH, SH. MH

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang Penulis lahir di Benua Ratu, Bengkulu, pada tanggal 14 November 1970. Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1, di Universitas Lampung pada tahun 1996, kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2010. Penulis mulai bergabung di UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2017, dengan mengampuh mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.



Ahmad Asroni, Penulis adalah dosen MKU Universitas Islam Indonesia (UII). Ia lahir di sebuah desa kecil di kota ukir, Jepara pada 6 Desember 1981. Ia mengenyam pendidikan sarjana di Fakultas Filsafat UGM dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijga. Kemudian melanjutkan studi di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Saat ini sedang menimba ilmu di Program Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga. Sejumlah gagasannya pernah dipublikasikan dalam bentuk buku (ajar, referensi, monograf), jurnal ilmiah, majalah, dan media online. Selain itu, ia juga cukup sering mengisi kegiatan ilmiah dan memenangi lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Ia berdomisili di Kalangan UH V No. 754 RT 17 RW 04 Pandeyan, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161. Ia dapat dihubungi melalui 081328426798 (Telp/WA) dan E-mail: ahmad.asroni@uii.ac.id.



Junaidi, S.H., M.H., C.L.A.

Dosen Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti

Penulis lahir di Palembang, pada tanggal 03 November 1978. Penulis seorang Praktisi Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2013) dan Pascasarjana Hukum diselesaikan di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2016) dengan Program Studi Hukum Bisnis. Menyelesaikan Pendidikan Auditor Hukum di Jimly School of Law and Government (JSLG), angkatan 13 (2014). Penulis juga sebagai narasumber dalam berbagai seminar

nasional. Aktif dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat dalam berbagai jurnal nasional, prosiding tingkat nasional dan internasional dan Book Chapter dengan berbagai Universitas dan lembaga kajian penelitian.

Alamat blogspot: <https://iustumilmiah.blogspot.com/?m=1>

email: junaidi@unisti.ac.id

Ramlah Dahlan, lahir Gorontalo, 08 Agustus 1964. Dosen tetap pada Universitas Alkhairaat Palu pada program studi Ahwalul Syakhshiyah, Hukum Keluarga, Ilmu Hukum Fakultas Agama Islam juga mengajar pada program studi Magister Manajemen S2 Universitas Alkhairaat Palu.

Dr. Gusnarib Wahab, M.Pd. lahir di Macanre Soppeng Sulawesi Selatan tepatnya pada tanggal 07 Juli 1964. Pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Soppeng. Pendidikan S1 pada Universitas Veteran RI Makassar pada program studi Ilmu Pendidikan. Pendidikan S2 pada Universitas Negeri Makassar pada program studi Manajemen Pendidikan dan pendidikan S3 pada Universitas Negeri Makassar pada program studi Ilmu Pendidikan.

Sejak tahun 1989 telah mengabdikan diri di beberapa lembaga pendidikan di Sulawesi Tengah, pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Palu, Universitas Alkhairaat Palu, Universitas Terbuka UP BJJ Palu, dan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sejak 1989 sampai sekarang menjadi dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LP2M UIN Datokarama Palu serta aktif di beberapa organisasi kampus seperti organisasi Pemerintahan, Keagamaan dan Kemasyarakatan. Menjadi aktivis Seni dan Pramuka juga aktif sebagai relawan kemanusiaan sejak tahun 2000 sampai sekarang.

Menjadi seorang penulis dan aktif sebagai penulis dan peneliti sejak tahun 2000 sampai sekarang pada konsentrasi bidang “Pendidikan Pembelajaran dan Karakter”.



Elizamiharti, S.H., M.H. Lahir di Sawah Tangah, Sumatera Barat, 28 Juni 1968. Penulis adalah Dosen tetap Universitas Metamedia, sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Indonesia Padang. Menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum tahun 1992, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Andalas tahun 2014. Berdomisili di kota Padang. Penulis menekuni profesi sebagai dosen untuk matakuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Etika Profesi. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: elizamiharti2@gmail.com.

Dr. Jihan Abdullah, M.Ag. Lahir di Palu, 11 Agustus 1977. Menyelesaikan S1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu, S2 pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan S3 Prodi Pendidikan dan Keguruan Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Sejak tahun 2003 mengabdikan sebagai dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.